



**RENSTRA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2021 -2026**



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2021**

**PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
LAMPIRAN 15
NOMOR: 100/425/IV.01/2021 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021-
2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pemerintah Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007. RPJPD Kota Bandar Lampung 2005-2025 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung

untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai perodesasi Kepala Daerah Kota Bandar Lampung terpilih.

Tahapan RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahapan ke-4 dari RPJPD Kota Bandar Lampung tahun 2005-2025 atau tahapan RPJMD terakhir periode jangka panjang dari tiga periode RPJMD sebelumnya (2005-2010, 2011-2015, dan 2016-2021). Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 640/16/SJ Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, maka untuk perodesasi RPJMD Kota Bandar Lampung adalah Tahun 2021-2026.

Untuk merealisasikan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 yang merupakan komitmen politik kepala daerah terpilih, maka ditindaklanjuti dengan perencanaan teknis yaitu penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD pada Bagian Keenam, Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra, (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra, (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, (5) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, dan (6) Penetapan Renstra.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja yang dapat diuraikan bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat

Daerah Kota Bandar Lampung, Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi, RPJMD Kota Bandar Lampung, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bandar Lampung.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung diperlukan suatu dokumen rencanas trategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung tersebut harus terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung.

Renstra merupakan komitmen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kota Bandar Lampung serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Bandar Lampung, yaitu "***Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Kerakyatan***".

1.2 Landasan Hukum

Rencana strategis (Renstra) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020 - 2024
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);

21. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 07);
23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 01);
24. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 58 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 58).

1.3 Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Program Keluarga Berencana Tahun 2021- 2026 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Program Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Program Keluarga Berencana khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Program Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 adalah untuk :

1. Sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Bandar Lampung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai oleh APBD Kota Bandar Lampung dan sumber pembiayaan APBN.

2. Sebagai tolak ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan satuan kerja perangkat daerah dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung
3. Memberi gambaran tentang kondisi umum pelaksanaan program Dinas Pengendalian Penduduk dan Program Keluarga Berencana di Kota Bandar Lampung saat dalam pembangunan provinsi dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi program untuk menunjang sebagai perwujudan visi dan misi daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Bandar Lampung
4. Sebagai panduan penyusunan program dan kegiatan yang terpadu, terarah dan terukur bagi jajaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Bandar Lampung.
5. Sebagai arahan dalam memahami dan menilai arah dan kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rentang waktu lima tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Bab ini memuat informasi tentang peran tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan periode tahun-tahun sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Pada Bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung; telaahan visi, misi, dan program walikota dan wakil walikota terpilih; telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung jangka menengah

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam jangka menengah mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung merupakan instansi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 44 tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 44 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung, tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi:

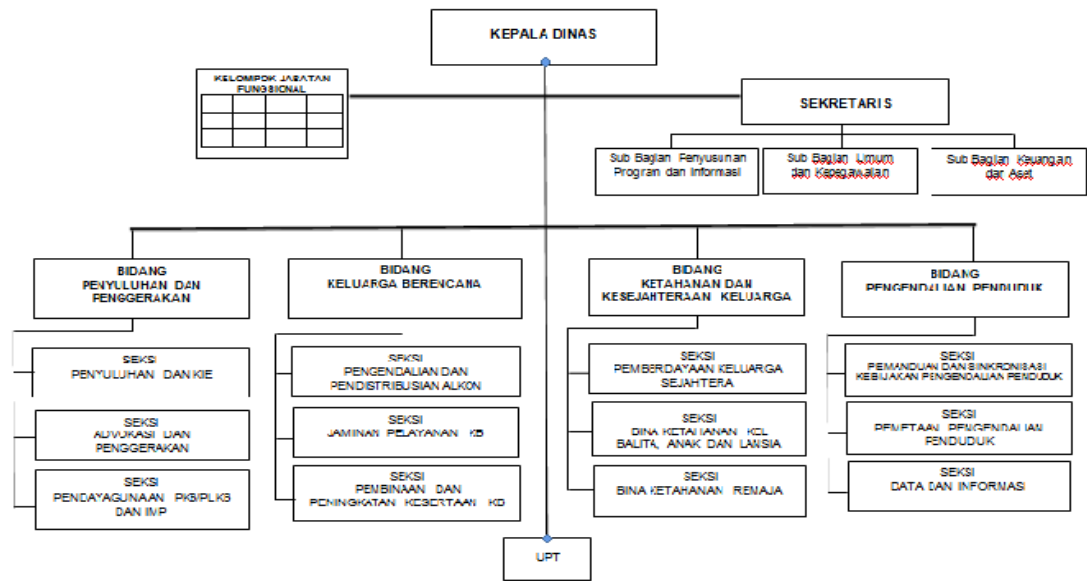
- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;

1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Informasi;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
-
- c. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
 1. Seksi Penyuluhan dan Komunikasi Informasi Edukasi
 2. Seksi Advokasi dan Penggerakan
 3. Seksi Pendayagunaan Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Institusi Masyarakat Perkotaan
 - d. Bidang Keluarga Berencana;
 1. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi
 2. Seksi Jaminan Pelayanan KB;
 3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB
 - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ;
 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
 3. Seksi Bina Ketahanan Remaja.
 - f. Bidang Pengendalian Penduduk ;
 1. Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
 2. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
 3. Seksi Data dan Informasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - h. Kelompok jabatan fungsional;

Grafik 1.1 Struktur organisasi secara rinci, sebagai berikut :



2.2 Sumber Daya

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, yaitu :

Tabel 1.1 Inventaris Nilai Barang Di Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung

No.	Kelompok Barang	Nilai (Rp.)
1	Tanah	417.000.000
2	Alat-alat angkutan	3.442.495.000
3	Alat pertanian dan peternakan	1.980.000
4	Alat alat kantor dan rumah tangga	1.185.831.700
5	Alat studio dan komunikasi	101.011.000
6	Alat bengkel	9.900.000
7	Alat alat kedokteran dan kesehatan	2.283.310.100
8	Gedung dan bangunan	1.396.567.000
9	Barang bercorak kesenian dan kebudayaan	14.500.000
10	Extra Countable	3.000.000
	Jumlah	8.855.594.800

Penjelasan lebih lanjut mengenai kelompok barang sebagai berikut :

a) Tanah

Tanah yang dimiliki seluas 1.470 M² yang terdiri dari tanah sebagai berikut:

- Tanah Kosong : 370M²
- Tanah Bangunan Kantor : 1100M²

b) Bangunan

Bangunan gedung kantor terdiri dari 3 lantai seluas 1100 M² yang terletak diatas tanah seluas 1.470 M² di Jalan Bung Tomo No. 12. Gedung air Kecamatan Tanjung Karang Barat.

c) Inventaris/Peralatan Kantor

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

d) Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dimiliki per Agustus 2021 sebanyak 5 (Lima) unit Kendaraan Roda 5 (Mobil Unit Pelayanan, Mobil Akseptor, Alkon dan Kendaraan Dinas) dan 122 unit Kendaraan Roda 2.

e) Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung berjumlah 127 orang terdiri dari laki-laki 51 orang dan perempuan 76 orang, yang dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Di Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung

No.	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	17
2	Fungsional Lapangan (Penyuluh Keluarga Berencana)	88
3	Tenaga Teknis Lainnya	-
4	Arsiparis	-
5	Staf	22
Jumlah		127

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung memiliki kader Intitusi Masyarakat Perkotaan. IMP sendiri pada hakekatnya merupakan wadah pengelolaan dan pelaksanaan Program KB Nasional mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Dusun/RW hingga tingkat RT. Ditingkat Desa/Kelurahan disebut Koordinator Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Koord. PPKBD), di tingkat Dusun dinamakan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan ditingkat RT dinamakan Sub Pembantu Pembina KB Desa (Sub PPKBD).

Selain Koord. PPKBD, PPKBD dan Sub PPKBD, ada lagi kader IMP yang juga berperan aktif mensukseskan program KB di tingkat lini lapangan yaitu Kelompok KB KS.

Kelompok KB-KS ini merupakan kelompok peserta KB/KS dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program KB ditingkat RT yang melakukan kegiatan di bidang KB seperti Posyandu, UPPKS, kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS) yang terdiri dari kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan sebagainya.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung juga memilikit unit pelayanan dan konseling yang diberi nama Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Ragom Kencana. Keberadaan PPKS diharapkan menjadi solusi atas berbagai persoalanyang dihadapi keluarga-keluarga kita sekaligus mengantisipasinya supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Melalui PPKSkeluarga dapat bangkit dari keterpurukan dan ketidakberdayaan yang selama ini menyebabkan kehidupannya tidak sejahtera. Oleh karena itu bentuk pelayanan dalam PPKS telah distandarkan secara nasional yang setidaknya mencakup delapan hal, yaitu:

- 1) Pelayanan informasi dan dokumentasi kependudukan dan keluarga berencana. Melalui layanan ini keluarga akan memperoleh data dan informasi pengelolaan program kependudukan dan KB melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang berbasis teknologi Informasi. Dengan demikian, keluarga akan mendapatkan informasi akurat yang dibutuhkan dalam rangka memperluas wawasannya tentang kebijakan pemerintah dalam pembangunan keluarga sejahtera maupun pengendalian penduduk.
- 2) Konseling keluarga balita dan anak. Melalui layanan ini keluarga akan memperoleh akses untuk berkonsultasi tentang bagaimana merawat dan mengasuh balita agar dapat tumbuh dan berkembang secara ideal, bagaimana membentuk karakter anak sejak dini dan bagaimana seharusnya melakukan pengasuhan anak di era globalisasi yang serba digital.
- 3) Konseling pra nikah. Melalui layanan ini maka para calon pengantin akan memperoleh akses untuk berkonsultasi tentang konsep pernikahan yang ideal menurut agama, bagaimana menyiapkan mental sebelum menikah, membangun komunikasi dengan pasangan, membangun komitmen suami isteri serta menyiapkan skill yang harus dimiliki agar keluarga yang dibangun

dapat memiliki kemampuan ekonomi yang mendukung terwujudnya keluarga sejahtera.

- 4) Konseling keluarga remaja dan remaja. Melalui layanan ini, keluarga yang memiliki remaja dan remajanya sendiri akan memperoleh akses untuk berkonsultasi tentang bagaimana membangun komunikasi efektif antara orangtua dengan remaja, bagaimana membangun kepercayaan dan keterbukaan dengan remaja, bagaimana cara mengatasi persoalan yang membelit remaja, bagaimana menghindari persoalan yang berkaitan dengan seksualitas, napza maupun HIV-AIDS, dan sebagainya.
- 5) Konseling keluarga lansia dan lansia. Melalui layanan ini keluarga yang memiliki lansia dan para lansianya akan memperoleh akses untuk berkonsultasi tentang bagaimana menjaga kesehatan fisik lansia, menjaga kesehatan reproduksinya, menyiapkan mental psikologis dan spiritual, tetap menjaga hubungan sosial kemasyarakatan dan menyiapkan kegiatan ekonomi produktif yang masih memungkinkan dilakukan oleh lansia.
- 6) Konseling keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Melalui layanan ini keluarga akan memperoleh akses untuk berkonsultasi tentang penggunaan alat/cara kontrasepsi yang rasional, efektif dan efisien, bagaimana menjaga kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, mencegah Infeksi Menular Seksual (IMS) dan kanker alat reproduksi hingga menjaga kelangsungan hidup Ibu, bayi dan anak.
- 7) Konseling keluarga (married conceling). Melalui layanan ini keluarga akan memperoleh akses yang seluas-luasnya untuk berkonsultasi tentang bagaimana membangun keluarga harmonis, menjalankan fungsi-fungsi keluarga serta bagaimana melakukan berbagai penyesuaian dalam kehidupan rumah tangga serta mengatasi berbagai permasalahan dalam keluarga.

8) Pembinaan usaha ekonomi keluarga. Melalui layanan ini keluarga akan mendapatkan banyak informasi tentang bagaimana membangun wirausaha, mengelola dan mengembangkannya serta mendapatkan bantuan teknis produksi, akses modal, pemasaran dan sebagainya. Melalui berbagai layanan tersebut, maka dapat dipastikan keluarga akan dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan 8 fungsi keluarga sebagai modal dasar untuk membangun keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Kelompok kader lain yang berada di lapangan dan terjun langsung di masyarakat adalah Kader Tribina Keluarga, yang terdiri dari:

1) Bina Keluarga Balita

Bina keluarga balita adalah kegiatan yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, yang dilaksanakan oleh sejumlah kader dan berada ditingkat RW. Bina Keluarga Balita (BKB) adalah upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan anak balita.

2) Bina Keluarga Remaja

Bina keluarga remaja (BKR) adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok keluarga/orangtua untuk meningkatkan bimbingan/pembinaan tumbuh kembang remaja secara baik dan terarah dalam rangka membangun keluarga yang berkualitas.

3) Bina Keluarga Lansia

Bina Keluarga Lansia adalah Kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan,

perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Kelompok bina keluarga yang ada di Kota Bandar Lampung Tahun 2021 yaitu:

1. Kelompok Bina Keluarga Balita sebanyak 134 kelompok
2. Kelompok Bina keluarga Remaja sebanyak 131 kelompok
3. Kelompok Bina Keluarga Lansia sebanyak 133 kelompok

2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung, meliputi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang terdiri atas Program Keluarga Berencana, Program Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat, Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Program Pengendalian Penduduk. Program kegiatan ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung yang memiliki 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan. Secara umum yang menjadi target binaan adalah Pasangan Usia Subur (PUS) serta peserta Keluarga Berencana yang ada di Kota Bandar Lampung. Data Perkembangan Peserta KB dan Pasangan Usia Subur dari tahun 2016 sampai dengan 2020 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Jumlah Capaian PUS,PA dan PB

Tahun	PUS	PA	PB
2016	166.905	115.686	28.605
2017	168.093	121.750	31.937
2018	171.732	124.377	26.185
2019	172.782	125.533	31.973
2020	173.004	125.938	18.600

Sumber : Buku Hasil Pendataan Bidang Data Informasi BKKB dan PP tahun 2021

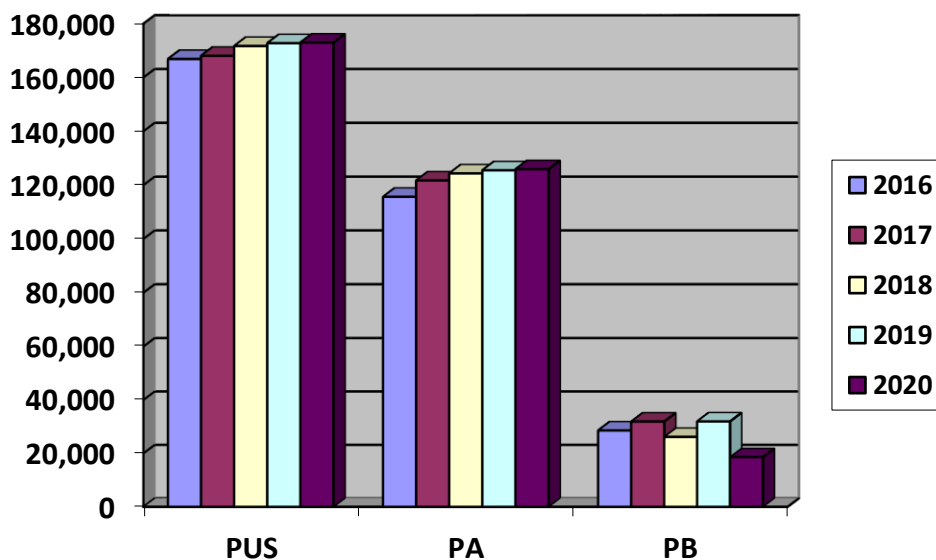
Keterangan :

PUS : Pasangan Usia Subur

PA : peserta KB aktif (peserta KB secara terus menerus

tanpa disertai kehamilan)
PB : peserta KB baru

Grafik 2.1
Perkembangan Peserta KB aktif dan Pasangan Usia Subur di Kota
Bandar Lampung Tahun 2016-2020



Perkembangan Peserta KB baru dan Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel dan grafik diatas. Semakin meningkatnya jumlah pasangan usia subur maka jumlah peserta KB aktif juga terlihat semakin meningkat. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya KB semakin meningkat.

Pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2019 dapat dilihat pada Tabel TC. 23 terlampir

Pengelolaan Pendanaan Pelayanan

Alokasi Anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung tahun 2016-2021 beserta serapannya dapat dilihat pada Tabel TC. 24 tabel terlampir.

Berdasarkan Tabel TC. 24 tersebut, dapat dilihat bahwa alokasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi persentase penyerapan anggaran (rasio realisasi antara anggaran dan realisasi) menurun dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan tidak tercapainya beberapa komponen pendapatan daerah sehingga mempengaruhi kemampuan daerah dalam pendanaan belanja daerah.

Adapun gambaran program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2016-2020 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Tabel Form E.80

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk dapat mengakibatkan efek positif yang berakibat pada munculnya potensi-potensi ekonomi, sosial dan lingkungan yang baru, tetapi bisa pula berupa pertumbuhan negatif yang membawa konsekuensi bertambahnya tingkat kemiskinan dalam suatu negara. Efek negative dari pertumbuhan penduduk yang tidak dimanajemen dengan baik adalah pola urbanisasi yang tinggi serta permasalahan kesehatan, lingkungan, keamanan dan permasalahan sosial lainnya yang akan bertambah saat jumlah penduduk telah melampaui kapasitas ruang untuk menampungnya

Hasil proyeksi Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Bandar Lampung pada periode 2015-2020 adalah sebesar 1,77 %, menurun dari pada periode 2010-2015 yakni sebesar 2,04%. Walaupun demikian, upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk tetap harus dilakukan. Apalagi,

terdeteksi bahwa mulai tahun 2010, Indonesia telah masuk dalam fenomena yang terjadi seabad sekali yang disebut Bonus Demografi.

Selama kurun waktu satu dekade terakhir ini, Indonesia tengah mengalami fenomena transisi demografi. Kondisi ini terindikasi dari hasil sensus penduduk pada tahun 2000 yang memberikan fakta signifikan bahwa program KB (Keluarga Berencana) yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia pada waktu yang lalu memberi dampak yang sangat positif. Fakta yang diperlihatkan oleh Sensus Penduduk 2010 memperlihatkan bahwa penduduk berusia dibawah 15 tahun hampir tidak bertambah; dimana pada periode tahun 1970-1980an jumlahnya sekitar 60 juta dan hingga akhir tahun 2000 penduduk dalam kelompok usia ini hanya meningkat menjadi 63-65 juta jiwa. Sebaliknya, penduduk usia 15 – 64 tahun pada tahun 1970 jumlahnya mencapai 63-65 juta dan telah berkembang menjadi lebih dari 133 – 135 juta, atau mengalami kenaikan dua kali lipat selama 30 tahun.

Penduduk memang sama halnya dengan kemiskinan, tak dapat dihadang, tak dapat dikurangi. Yang bisa dilakukan dari sekarang dan untuk seterusnya, khususnya dalam masalah pertumbuhan penduduk, adalah menekan dan meminimalisir pertumbuhannya. Sebab, jika Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung tidak memanfaatkan momentum ini, maka Bandar Lampung justru akan merugi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung terutama dalam hal ini dipromotori oleh Program Pengendalian Penduduk hendaknya memperhatikan kondisi kependudukan baik saat ini maupun pada waktunya Bonus Demografi telah mencapai puncak pengaruhnya terhadap stabilitas Indonesia di tahun 2020 nanti.

Dalam konsep ekonomi kependudukan, bonus demografi juga dimaknai sebagai keuntungan ekonomis karena dengan semakin besarnya jumlah penduduk usia produktif maka akan semakin besar pula jumlah tabungan dari penduduk produktif sehingga dapat

memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kondisi tersebut juga dikenal sebagai jendela kesempatan (*windows of oppprtunity*) bagi suatu negara untuk melakukan akselerasi ekonomi dengan menggenjot industri manufaktur, infrastruktur, maupun UKM karena berlimpahnya angkatan kerja tersebut. Banyak Negara menjadi kaya karena berhasil memanfaatkan jendela peluang bonus demografinya untuk memacu pendapatan perkapita sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai; seperti yang terjadi di Cina, yang pertumbuhan ekonominya sebelum bonus demografi berkisar pada angka 6% meningkat menjadi 9,2 persen, Korea Selatan dari 7,3 persen menjadi 13,2 persen, Singapura dari 8,2 persen meningkat menjadi 13,6 persen dan Thailand dari 6,6 persen meningkat tajam menjadi 15,5 persen

Namun akan ada dampak efek negatif berikutnya paska bonus demografi yang harus diperhatikan yaitu terjadinya peningkatan penduduk usia tua sementara transisi usia muda menjadi usia produktif belum sempurna. Hal itulah yang kemudian menyebabkan pembengkakan jaminan social dan pensiunan sehingga akan mendorong terjadinya stagnasi dalam perekonomian nasional karena tabungan dari usia produktif dialihkan sebagai dana talangan keduahal tersebut.

Jika diperhatikan lebih seksama, bonus demografi akan menjadi pilar peningkatan produktifitas suatu Negara dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan SDM yang produktif dalam arti bahwa penduduk usia produktif tersebut benar-benar mampu menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka dan memiliki tabungan yang dapat dimobilisasi menjadi investasi. Akan tetapi jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana penduduk usia produktif yang jumlah besar tidak terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia dalam sebuah perekonomian, maka akan menjadi beban ekonomi karena penduduk usia produktif yang tidak memiliki pendapatan akan tetap menjadi beban bagi

penduduk yang bekerja dan akan memicu terjadinya angka pengangguran yang tinggi.

Beberapa tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Kota Bandar Lampung, khususnya dalam hal ini adalah Program Pengendalian Penduduk antara lain adalah

1. Kurangnya komitmen para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non pemerintah dalam penyelenggaraan Pelayanan KB.
2. Masih rendahnya permintaan atas Pelayanan KB akibat terjadinya perubahan nilai tentang jumlah anak ideal dalam keluarga.
3. Belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas Pelayanan KB, termasuk pelayanan KIE dan Konseling.
4. Masih tingginya kejadian kehamilan yang tidak diinginkan akibat tingginya *unmet need* dan ketidakberlangsungan penggunaan kontrasepsi
5. Masih tingginya kejadian kehamilan dan persalinan pada remaja perempuan usia 15-19 tahun.
6. Antisipasi Bonus Demografi pada periode 2021-2026 melalui program Generasi Berencana, Pengembangan TriBina, dan Peningkatan UPPKS.

Untuk mengatasi masalah atau kendala yang telah diuraikan di atas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung mencoba meningkatkan pelayanan dengan cara, antara lain :

1. Meningkatkan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan maupun pemakai alat kontrasepsi.
3. Mengusahakan pemerataan tempat dan tenaga pelayanan kontrasepsi baik dari unsur pemerintah maupun swasta
4. Mendekatkan pelayanan kepada sasaran dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANDAR LAMPUNG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Beberapa isu strategis dan permasalahan pengendalian kuantitas penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung yang harus mendapat perhatian khusus adalah:

- a. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan, antara lain:
 - Masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran.
 - Pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif, ditandai dengan pengetahuan tentang KB dan alat kontrasepsi masih rendah
 - Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan dan pembangunan keluarga
 - Pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender, tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB;
- b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB
 - Angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak meningkat secara signifikan

- Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi
 - Masih terdapat kesenjangan dalam kesertaan ber-KB (contraceptive prevalence rate/CPR) dan kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need),
 - Penggunaan alat dan obat Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (non MKJP) terus meningkat, sementara Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cenderung menurun
 - Kualitas pelayanan KB (supply side) belum sesuai standar, yaitu berkaitan dengan ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB, ketersediaan dan persebaran tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan KB, kemampuan bidan dan dokter dalam memberikan penjelasan tentang pilihan metode KB secara komprehensif termasuk mengenai efek samping alokon dan penanganannya, serta komplikasi dan kegagalan.
 - Rendahnya kesertaan KB Pria
 - Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (drop out) masih tinggi
- c. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian Ibu melahirkan. Permasalahan kesehatan reproduksi remaja, antara lain:
- Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi
 - Masih banyaknya perkawinan usia muda, ditandai dengan median usia kawin pertama perempuan yang rendah
 - Terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja

- Tingginya perilaku seks pra nikah di sebagian kalangan remaja, berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi;
- Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah;
- Cakupan dan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal.

d. Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluargamelalui pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain:

- Masih tingginya jumlah keluarga miskin,
- Pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anak masih rendah;
- Partisipasi, pemahaman dan kesadaran keluarga/orang tua yang memiliki remaja dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih rendah;
- Kualitas hidup Lanjut usia (lansia) dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia masih belum optimal;
- Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga

e. Penguatan Data dan Informasi Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Terdapat beberapa sumber data pembangunan kependudukan, KB dan KS,

diantaranya administrasi kependudukan yang mencatat registrasi pendudukan dan registrasi vital; sensus penduduk dan beberapa survei terkait bidang kependudukan dan KB; serta data sektoral pembangunan kependudukan dan KB termasuk data - data kajian dan evaluasi pembangunan Kependudukan dan KB.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagai penjabaran dari visi Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung yaitu: “Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan. Dan misi: Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan tujuan Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dan dengan dua sasaran yaitu: Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung dalam menterjemahkan visi, misi, dan tujuan tersebut memiliki tujuan untuk membangun Kota Bandar Lampung sebagai kota yang berwawasan kependudukan dan Keluarga Berencana.

Sebagaimana diketahui bahwa Kota Bandar Lampung yang merupakan ibu kota Propinsi Lampung merupakan wilayah yang sangat dekat dengan wilayah propinsi Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta dan Propinsi Sumatera Selatan, dimana perkembangan situasi di propinsi tersebut akan berdampak besar terhadap kondisi di wilayah Lampung, khususnya kota Bandar Lampung. Laju pertumbuhan penduduk yang relative tinggi sebagai akibat Adanya migrasi dari propinsi terdekat maupun wilayah-wilayah lain akan berdampak terhadap aspek kependudukan, terganggunya stabilitas keamanan, social, ekonomi dan lain sebagainya.

Keberhasilan program KB di Kota Bandar Lampung akan menjadi sumbangan yang sangat besar dan penting sebagai upaya pengendalian penduduk maupun peningkatan ketahanan keluarga untuk menunjang stabilitas sosial wilayah ini. Disamping itu melalui program KB Nasional akan memungkinkan terjadinya suatu keseimbangan penyebaran penduduk dan daya tampung lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung, diperlukan peran aktif masyarakat atau yang lebih dikenal dengan istilah "*Partisipasi Publik*". Partisipasi Publik merupakan bentuk peran sertamasyarakat Kota Bandar Lampung dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi jalannya pelayanan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk dengan kesadaran dan tanggung jawab penuh serta berdasarkan inisiatifnya sendiri.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Terkait

Secara urusan pemerintahan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung memiliki urusan, yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tingkat pemerintah pusat berada di bawah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Rencana Strategis BKKBN yang tertuang dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor: 06 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Tahun 2020-2024 memiliki sasaran strategis sebagai berikut:

- Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
- Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)
- Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR).

- Menurunnya persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
- Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 - 19 tahun)
- Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 - 49 tahun)

Sasaran tersebut telah dituangkan juga ke dalam penjabaran Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung. Hal tersebut dimaksudkan agar tercipta sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Beberapa hal yang bisa mendorong pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait dengan sasaran strategis tersebut adalah

- a. Dengan adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kementerian dan Lembaga terkait, maka diharapkan program pelayanan di Kota Bandar Lampung akan mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat, terutama terkait masalah pendanaan operasional kegiatan maupun sarana dan prasarana.
- b. Pelayanan yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga akan mendapat tolak ukur yang jelas karena sudah ada indikator-indikator kinerja yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Faktor penghambat yang akan dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait dengan sasaran strategis yang direncanakan oleh Kementerian dan Lembaga terkait antara lain :

- a. Belum tersedianya sarana dan prasarana di Kota Bandar Lampung yang mendukung sasaran strategis yang ditetapkan.
- b. Terkait masalah kelembagaan dan kebijakan, kondisi sosial-budaya masyarakat Bandar Lampung akan berbeda dengan daerah lain / cakupan nasional sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian / Lembaga terkait. Hal ini mendorong Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dan program-program kerja di tingkat Kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan suatu wilayah selalu didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, dalam pemanfaatan sumberdaya manusia suatu wilayah selalu ditekankan pada sejauh mana manusia dalam melakukan aktifitas pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia, dengan demikian dari aspek ini dapat ditentukan seberapa besar potensi yang masih tersedia, sehingga memudahkan untuk memberikan alternative prioritas pembangunan.

Terkait dengan masalah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masalah tata ruang wilayah memiliki perhatian tersendiri dalam Rencana Strategis, hal ini menjadi penting antara lain karena:

- a. Sebagai sarana untuk mengetahui kuantitas dan kondisi penduduk, baik berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, bahkan kondisi sosio-ekonomi
- b. Sebagai sarana untuk memproyeksikan pertumbuhan penduduk dan kemungkinan-kemungkinan konsenkuensinya serta pengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan
- c. Sebagai bahan pemantauan untuk melakukan pengendalian penduduk agar tidak terjadi ledakan jumlah penduduk yang dapat mempengaruhi kondisi masyarakat secara keseluruhan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Perencanaan pembangunan seyogyanya berorientasi kependudukan, mengingat penduduk sebagai fokus dan dasar utama dalam berbagai aspek pembangunan. Kependudukan memegang peranan penting dalam pembangunan. Kemajuan suatu bangsa diukur berdasarkan indikator kependudukan, seperti jumlah, pertumbuhan, komposisi dan distribusi penduduk. Berbagai indikator kependudukan tersebut berpengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan budaya. Selanjutnya berbagai bidang tersebut juga berpengaruh balik terhadap fertilitas, mortalitas dan mobilitas penduduk. Pada akhirnya fertilitas, mortalitas, dan mobilitas penduduk berperan dalam menentukan jumlah, pertumbuhan, komposisi dan distribusi penduduk.

Dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan Keluarga Berencana dapat dirumuskan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

- Jumlah penduduk yang terus bertambah
- Ledakan penduduk usia kerja muda
- Data kependudukan yang belum memadai
- Mobilitas penduduk meningkat

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra. Tujuan dan sasaran yang akan ditetapkan dalam Renstra OPD harus selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis perangkat daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diuraikan sebagai berikut:

Misi I: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

Tujuan : Meningkatkan Kualitas
Sumber Daya Manusia

Indikator Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan dan
Terkendalinya laju Pertumbuhan Penduduk

Sasaran : Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Bidang Keluarga Berencana

Indikator Sasaran :

1. Semakin menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) setiap tahun.
2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)
3. Menurunnya pasangan usia subur (PUS) yang isterinya dibawah 20 tahun
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
5. Meningkatnya Persentase Tingkat keberlangsungan pemakaian kotrasepsi
6. Meningkatnya Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber KB

Tabel TC.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kota Bandar Lampung form terlampir.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung, strategi merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka tujuan dan sasaran pembangunan jangkamenengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel5.1. berikut ini.

Tabel T-C.26

Strategi dan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung format terlampir.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut dengan kegiatan serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada 6.1 yang bersumber pada Tabel TC.27.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja juga dapat diartikan sebagai suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Indikator Kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ada pada Lampiran 1. Capaian Kinerja Program dapat dilihat pada Tabel TC.28. format terlampir

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung selama periode Tahun 2021-2026 mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Bandar Lampung. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan strategis dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk menjadi petunjuk arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bandar Lampung.

Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, setiap tahun akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Apabila diperlukan akan dilakukan revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang pelaksanaannya dan mekanisme yang berlaku tetap mengacu pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

TC-23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung
Kota Bandar Lampung

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-																
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	-	-	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	100	100	100	100	100
2	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	-	-	5	5	5	5	10	15	5	5	5	10	15	100	100	100	100	100
3	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	-	-	0	0	0	5	10	15	0	0	5	10	15	0	0	100	100	100
4	Jumlah sector yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jumlah kerja sama penyelenggara Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal yang melakukan pendidikan kependudukan	-	-	45	139	139	139	109	109	139	139	139	109	109	100	100	100	100	100
6	Rata-rata jumlah anak per keluarga	-	-	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	100	100	100	100	100
7	Ratio Akseptor KB	-	-	67.32	67.32	67.34	67.36	67.38	67.4	0.69	0.72	0.72	0.73	0.75	9757	9353	9356	9230	8987
8	Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan nikah usia 15 – 49	-	-	68.16	67.28	68.16	68.57	68.72	69	69.31	72.43	72.34	72.65	75	97	94	95	95	92
9	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 (ASFR 15-19)	-	-	48	48	46	44	42	40	13.5	14.5	14.7	14.8	15.5	356	317	299	284	258
10	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)	-	-	8.93	12.93	12.92	10.93	10.13	9.31	12.93	12.26	12,10	11.62	11,50	100	105	#####	87.18	#####
11	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	-	30.5	30.5	32.48	33.18	34.58	35.38	30.5	32.48	33.96	34.19	34.68	100	100	97.7	101.1	102

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
12	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	-	-	10.7	10.7	10.7	9.57	7.71	6.48	10.7	21.3	15.9	16.54	15.58	100	50.28	60.34	46.61	41.59
13	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	-	-	4859	8579	10557	10996	11598	12589	9295	11557	11501	11657	11357	92	91.35	95.61	99.49	110.8
14	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB	-	-	2158	2780	3987	3524	40985	41590	2894	4075	3749	41111	40589	96	97.84	94	99.69	102.5
15	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB	-	-	1785	2758	4690	4589	4698	4890	2894	4723	4626	4786	4634	95	99.3	99.2	98.16	105.5
16	Pusat Layanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	-	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	100	100
17	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	-	-	45	139	139	139	109	109	139	139	139	109	109	100	100	100	100	100
18	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	-	-	126	126	126	126	126	126	90	80	80	88	76	140	158	158	143	166
19	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB Mandiri	-	-	1359	3267	3598	3458	3356	3450	3190	3600	3590	3546	3267	102	99.94	96.32	94.64	105.6
20	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPPKBD) setiap desa/kelurahan	-	-	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	100	100	100	100	100
21	Cakupan ketersediaan dan distribusi obat dan alat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	-	-	30	30	30	30	30	31	30	30	30	30	31	100	100	100	100	100
22	Cakupan faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	-	-	30	30	30	30	30	31	30	30	30	30	31	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
23	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa	-	-	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	100	100	100	100	100
24	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	-	-	126	248	248	248	248	248	248	248	248	100	248	100	100	100	248	100
26	Cakupan keluarga yang mempunyai Balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	-	-	2938	4986	458	4769	4436	4690	5072	4574	4836	4588	4915	98	10.01	98.61	96.69	95.42
27	Rata-rata usia kawin pertama wanita	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Persentase Pembiayaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	100	100	100	100	100

Bandar Lampung, Oktober 2021
**KEPALA DINAS PEGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA BANDAR LAMPUNG**



Ir. YURIDA, M.Si.
NIP. 19620526 198603 2 005

TC-24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6,863,329,476	9,429,123,417	11,820,497,993	14,320,954,500	15,916,809,500	9,305,140,649	6,582,491,172	8,621,583,854	10,744,518,657	5,762,604,167	135.58	69.81	72.94	75.03	36.20		

Bandar Lampung, Oktober 2021
KEPALA DINAS PEGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA BANDAR LAMPUNG



Ir. YURIDA, M.Si.
NIP. 19620526 198603 2 005

TABEL TC.25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
			Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan Setiap Tahun	%	100	100	100	100	100	100	
			Total Fertility Rate (TFR)	%	2,37	2,35	2,30	2,25	2,20	2,15	2,15
			Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang isterinya dibawah 20 tahun	%	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,25
			Persentase kebutuhan ber KB tidak terpenuhi (unmeet need)	%	11,50	8,93	8,85	8,80	8,75	8,70	8,70
			Angka prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Cotraceptive (mCPR)	%	34,68	36,78	37,55	38,65	39,70	40,75	40,75
			Persentase Tingkat keberlangsungan pemakaian kotrasepsi	%	72,79	66,17	66,80	66,95	67,15	67,20	67,20
			Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber KB	%	87	89	90	92	94	95	95

Bandar Lampung, Oktober 2021
KEPALA DINAS PEGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA BANDAR LAMPUNG

Ir. YURIDA, M.Si.
NIP. 19620526 198603 2 005

TABEL 26

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021-2026

VISI: BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT

MISI: MENINGKATKAN KUALITAS DAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (PERTAMA)

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan						Urusan	Program Pembanguna	OPD Pelaksana
				2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Melakukan Advokasi, Sosialisasi, Edukasi, dan Fasilitasi Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Mengendalikan usia perkawinan pertama penduduk						PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas PP dan KB
				2 Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata di Setiap Wilayah dan Kelompok Masyarakat dengan Menjamin Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat dan Obat Kontrasepsi dengan Fokus pada Penurunan Unmet Need dan Resiko Drop Out KB								
				3 Meningkatkan Jumlah dan Penguatan Kapasitas Tenaga Lapangan KB dan Tenaga Kesehatan Pelayanan KB, serta Penguatan Lembaga di Tingkat Masyarakat untuk Mendukung Penggerakan dan Penyuluhan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera serta Reproduksi Bagi Remaja								

Tabel T.C 27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program, kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
							Tahun 2021				Tahun 2022				Tahun 2023								
							Target	APBD	DAK	TOTAL BELANJA	Target	APBD	DAK	TOTAL BELANJA	Target	APBD	DAK	TOTAL BELANJA	Target				
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia				Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.77	1.77					1.77					1.77					1.77	
Meningkatnya Penyeleenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Keluarga Berencana				Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung	Nilai	78.64	79					80					81					82	
		2 14 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	98.00	98.00	5,137,211,340	5,137,211,340	98.00	5,471,844,475		5,471,844,475	98.00	5,828,653,346		5,828,653,346					5,828,653,346	98.00
		2 14 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Bertualitas	%	98.00	98.00	22,620,250	22,620,250	98.00	23,750,251		23,750,251	98.00	27,550,000		27,550,000					27,550,000	98.00
		2 14 1 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dok	1 tahun	1 tahun	22,620,250	22,620,250	1 tahun	23,750,251		23,750,251	1 tahun	27,550,000		27,550,000					27,550,000	1 tahun
		2 14 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	%	100.00	100.00	4,055,529,392	4,055,529,392	100.00	4,348,808,726		4,348,808,726	100.00	4,643,788,373		4,643,788,373					4,643,788,373	100.00
		2 14 01 02.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kali	14	14	3,888,628,392	3,888,628,392	14	4,168,832,379		4,168,832,379	14	4,452,098,646		4,452,098,646					4,452,098,646	14
		2 14 1 2.02 03	Penyusunan, Penatausahaan dan Pengujian/Vertikasi Keuangan SKPD	Jasa Administrasi perkantoran Administrasi Keuangan yang Tertaksana	Bulan	12	12	166,901,000	166,901,000	12	177,701,000		177,701,000	12	180,701,000		180,701,000					180,701,000	12
		2 14 01 02.02 05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	Dokumen					1 Dokumen	10,275,347		10,275,347	1 Dokumen	10,996,727		10,996,727					10,996,727	1 Dokumen
		2 14 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%		80.00			80.00	10,000,000		10,000,000	80.00	10,500,000		10,500,000					10,500,000	80.00
		2 14 1 2.05 09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Paket					1 tahun	10,000,000		10,000,000	1 tahun	10,500,000		10,500,000					10,500,000	1 tahun

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja,tujuan,sasaran,Program, kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
							Tahun 2021				Tahun 2022				Tahun 2023						
							Target	APBD	DAK	TOTAL BELANJA	Target	APBD	DAK	TOTAL BELANJA	Target	APBD	DAK	TOTAL BELANJA	Target	APBD	DAK
		2 14 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	%	98.00	98.00	103,652,000	103,652,000	98.00	99,875,800		99,875,800	98.00	108,784,790		108,784,790	98.00			
		2 14 1 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Paket	1	1	4,880,000	4,880,000	1	4,880,000		4,880,000	1	6,000,000		6,000,000	1			
		2 14 1 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Pengekspansikan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Paket	1	1	24,476,000	24,476,000	1	25,699,800		25,699,800	1	26,984,790		26,984,790	1			
		2 14 1 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	1	1	7,296,000	7,296,000	1	7,296,000		7,296,000	1	8,550,000		8,550,000	1			
		2 14 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Persen	100	100			100	10,000,000		10,000,000	100	10,000,000		10,000,000	100			
		2 14 1 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	1	1	3,750,000	3,750,000	1	3,750,000		3,750,000	1	4,000,000		4,000,000	1			
		2 14 1 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	1	1	3,250,000	3,250,000	1	3,250,000		3,250,000	1	3,250,000		3,250,000	1			
		2 14 1 2.06 08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100.00	100.00	10,000,000	10,000,000	100.00	10,000,000		10,000,000	100.00	10,000,000		10,000,000	100.00			
		2 14 1 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100.00	100.00	50,000,000	50,000,000	100.00	35,000,000		35,000,000	100.00	40,000,000		40,000,000	100.00			
		2 14 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	98.00	98.00	26,000,000	26,000,000	98.00	45,000,000		45,000,000	98.00	55,000,000		55,000,000	98.00			
		2 14 1 2.07 05	Pengadaan mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket					1	25,000,000		25,000,000	1	30,000,000		30,000,000	1			
		2 14 1 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perengkapan Gedung kantor	Paket	1	1	26,000,000	26,000,000	1	20,000,000		20,000,000	1	25,000,000		25,000,000	1			
		2 14 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	%	100.00	100.00	737,000,000	737,000,000	100.00	737,000,000		737,000,000	100.00	761,000,000		761,000,000	100.00			
		2 14 1 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12	12	155,000,000	155,000,000	12	155,000,000		155,000,000	12	155,000,000		155,000,000	12			
		2 14 1 2.08 04	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12	12	582,000,000	582,000,000	12	582,000,000		582,000,000	12	606,000,000		606,000,000	12			
		2 14 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	%	98.00	98.00	192,409,698	192,409,698	98.00	207,409,698		207,409,698	98.00	222,030,183		222,030,183	98.00			
		2 14 1 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Paket	1 tahun	1 tahun	142,184,698	142,184,698	1 tahun	142,184,698		142,184,698	1 tahun	149,293,933		149,293,933	1 tahun			
		2 14 1 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Paket	1 tahun	1 tahun	30,000,000	30,000,000	1 tahun	30,000,000		30,000,000	1 tahun	31,500,000		31,500,000	1 tahun			
		2 14 1 2.09 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Paket	1 tahun	1 tahun	20,225,000	20,225,000	1 tahun	20,225,000		20,225,000	1 tahun	21,236,250		21,236,250	1 tahun			
		2 14 1 2.09 06	Pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Terpelihara						1 tahun	15,000,000		15,000,000	1 tahun	20,000,000		20,000,000	1 tahun			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja,tujuan,sasaran,Program, kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
							Tahun 2021				Tahun 2022				Tahun 2023				Target			
							Target	APBD	DAK	TOTAL BELANJA	Target	APBD	DAK	TOTAL BELANJA	Target	APBD	DAK	TOTAL BELANJA				
		2 14 2 2.02 07	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB	Paket					1 Kegiatan	50,000,000			50,000,000	1 Kegiatan	52,500,000			52,500,000	1 Kegiatan		
		2 14 2 2.02 11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga	Paket					1 Kegiatan	200,000,000			200,000,000	1 Kegiatan	210,000,000			210,000,000	1 Kegiatan		
		2 14 3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Total Fertility Rate (TFR)	%	2.37	2.35								2.25					2.20		
				Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	0.30	0.29			0.28					0.27					0.26		
				Persentase kebutuhan ber KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	11.50	8.93			8.85					8.80					8.75		
				Angka prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Cotraceptive (mCPR)	%	34.68	36.78	14,389,070,000	5,649,906,000	20,038,978,000		15,108,523,500	5,932,403,400	21,040,926,900		15,863,949,675	6,229,023,570			22,092,973,245	39.70	
				Persentase Tingkat keberanggunan pemakaian kontrasepsi	%	72.79	66.17			66.80					66.95					67.15		
		2 14 3 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	%	1 Kegiatan				3 Kegiatan					4 Kegiatan					4 Kegiatan		
		2 14 3 2.01 02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kebutuhan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Paket	1 kegiatan			86,045,000	1 kegiatan			86,045,000	1 kegiatan	190,347,250			190,347,250	1 kegiatan	199,864,613	1 kegiatan	199,864,613
		2 14 3 2.01 07	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Paket	15 UPT di Kecamatan			4,383,401,000	20 UPT di Kecamatan			4,383,401,000	20 UPT di Kecamatan	219,170,050							
		2 14 3 2.01 09	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Pengendalian Program KKBPK	Paket	1 kegiatan			100,000,000	1 kegiatan			100,000,000	1 kegiatan	105,000,000			105,000,000	1 kegiatan	110,250,000	1 kegiatan	110,250,000
		2 14 3 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kebutuhan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	%	1 Kegiatan				4 Kegiatan				6 Kegiatan						6 Kegiatan		
		2 14 3 2.02 02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Paket	Pengadaan kendaraan roda Empat, IUD KIT, BKB KIT, Pembangunan UPT, DLL			1,266,507,000	Pengadaan kelengkapan SIGA, IUD KIT, Pembangunan UPT, DLL			63,325,350	1,329,832,350	1,329,832,350		66,491,618	1,396,323,968	1,396,323,968		Pengadaan kendaraan roda Empat, IUD KIT, Pembangunan UPT, DLL	
		2 14 3 2.02 04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase Meningkatnya Peran/ Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP	Paket	126 PPKBD dan 2774 Sub PPKBD			13,119,500,000	126 PPKBD dan 2774 Sub PPKBD			20038978000	126 PPKBD dan 2774 Sub PPKBD	13,636,126,250			13,636,126,250	126 PPKBD dan 2774 Sub PPKBD	14,317,932,563	261810675	126 PPKBD dan 2774 Sub PPKBD
		2 14 3 02.03	Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	%	1 Kegiatan				2 Kegiatan				4 Kegiatan						4 Kegiatan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja,tujuan,sasaran,Program, kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
							Tahun 2021				Tahun 2022				Tahun 2023				
							Target	APBD	DAK	TOTAL BELANJA	Target	APBD	DAK	TOTAL BELANJA	Target	APBD	DAK	TOTAL BELANJA	Target
		2 14 3 2.03 05	Penyusunan rencana kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepasi (ALKON) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah distribusi Alon dan sarana penunjang pelayanan KB ke Fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejingnya di Kota Bandar Lampung	Paket	102 Faskes	102 Faskes	45,000,000	45,000,000	102 Faskes	47,250,000		47,250,000	102 Faskes	49,612,500		49,612,500	102 Faskes	
		2 14 3 2.03 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase Sarana penunjang pelayanan KB	Paket	105.000 Akseptor	105.000 Akseptor	483,525,000	483,525,000	105.000 Akseptor	375,000,000		375,000,000	105.000 Akseptor	393,750,000		393,750,000	105.000 Akseptor	
		2 14 3 2.03 08	Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejingnya	Jumlah Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Paket					102 Faskes	39,800,000		39,800,000	102 Faskes	41,790,000			102 Faskes	
		2 14 3 2.03 09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Reproduksi Di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Reproduksi Di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Paket	15 LPT di Kecamatan	20 LPT di Kecamatan			20 LPT di Kecamatan		4,602,571,050	4,602,571,050	20 LPT di Kecamatan	230,128,553	4,832,699,603	4,832,699,603	20 LPT di Kecamatan	
		2 14 3 2.03 11	Dukungan operasional pelayanan KB Bergerak	Jumlah pelayanan KB pada mobil unit pelayanan (MUYAN)	Paket					20 Kecamatan	420,000,000		420,000,000	20 Kecamatan	441,000,000			20 Kecamatan	
		2 14 3 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Desa/Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Keseratan Ber-KB	Jumlah Kebutuhan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Keseratan Ber-KB	%	1 Kegiatan	2 Kegiatan			2 Kegiatan				2 Kegiatan				2 Kegiatan	
		2 14 3 2.04 01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Keseratan Ber-KB	Persentase Cakupan keseratan Ber-KB di Kota Bandar Lampung	Paket	1 kegiatan	1 kegiatan	285,000,000	285,000,000	1 kegiatan	120,000,000		120,000,000	1 kegiatan	126,000,000		126,000,000	1 kegiatan	
		2 14 3 2.04 02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Pembinaan Lintas Sektor di Kampung KB	Paket	1 kegiatan	1 kegiatan	270,000,000	270,000,000	1 kegiatan	175,000,000		175,000,000	1 kegiatan	183,750,000		183,750,000	1 kegiatan	
		2 14 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB yang ber-KB) yang ber KB	%	87	89	8,723,953,052	472,999,000	90	9,160,150,705	496,648,950	9,656,799,655	92	9,618,158,240	521,481,397	10,139,639,637	94	
		2 14 4 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%	1 Kegiatan	2 Kegiatan			3 Kegiatan				3 Kegiatan				3 Kegiatan	
		2 14 4 2.01 01	Pembinaan Kelompok Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL) Lint. Peningkatan	Persentase Kualitas Anggota Bina Keluarga Balita, Anak dan Lansia persentase pendapatan Keluarga Sejahtera Peningkatan Pemahaman tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Paket	1825 Kader Bina Keluarga	1825 Kader Bina Keluarga	8,403,953,052	20038978000	1825 Kader Bina Keluarga	8,724,150,705		8,724,150,705	1825 Kader Bina Keluarga	9,160,358,240		9,160,358,240	1825 Kader Bina Keluarga	
		2 14 4 02.01 02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/LPPKS)	Jumlah Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/LPPKS	Paket		1 kegiatan		472,999,000	1 kegiatan		496,648,950		1 kegiatan		521,481,398		1 kegiatan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja,tujuan,sasaran,Program, kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
							Tahun 2021				Tahun 2022				Tahun 2023					
							Target	APBD	DAK	TOTAL BELANJA	Target	APBD	DAK	TOTAL BELANJA	Target	APBD	DAK	TOTAL BELANJA	Target	
		2.14.04.02.01.03	Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BK, BKR, BKL, PPPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Pengetahuan pengelola Poktan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BK, BKR, BKL, UPPKS, PK-R)	Paket					1 kegiatan	45.000.000			45.000.000	1 kegiatan	47.250.000			47.250.000	1 kegiatan
		2.14.4.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%	1 Kegiatan	1 Kegiatan			3 Kegiatan					3 Kegiatan					3 Kegiatan
		2.14.4.2.02.02	Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam pergerakan operasional pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BK, BKR, BKL, PPPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Poktan yang dibina program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BK, BKR, BKL, UPPKS, PK-R)	Paket					1 kegiatan	55.000.000			55.000.000	1 kegiatan	57.750.000			57.750.000	1 kegiatan
		2.14.4.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BK, BKR, BKL, PPPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Poktan yang dibina program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BK, BKR, BKL, UPPKS, PK-R)	Paket	1 kegiatan	1 kegiatan	320.000.000		1 kegiatan	336.000.000			336.000.000	1 kegiatan	352.800.000			352.800.000	1 kegiatan

Bandar Lampung, Oktober 2021
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA BANDAR LAMPUNG

Dr. YURIDA, M.Si
NIP. 19620526 198603 2 005

RENCANA P
DINAS P

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program, kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir			
						APBD	DAK	TOTAL BELANJA	Target	APBD	DAK	TOTAL BELANJA	Target	APBD	DAK	TOTAL BELANJA	Target	TOTAL APBD
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia				Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya laju Pertumbuhan Penduduk	%				1.77				1.77			1.77		
Meningkatnya Penyeenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Keluarga Berencana				Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung	Nilai				83				83			83		
		2 14 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	6,209,127,826		6,209,127,826	98.00	6,614,858,957		6,614,858,957	98.00	7,047,545,877	7,047,545,877	7,372,545,877	98.00	36,309,241,921
		2 14 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Bertualitas	%	28,927,500		28,927,500	98.00	35,000,000	30,373,875	35,000,000	98.00	45,000,000	-	45,000,000	98.00	182,848,001
		2 14 1 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dok	28,927,500		28,927,500	1 tahun	35,000,000	30,373,875	35,000,000	1 tahun	45,000,000	-	45,000,000	1 tahun	182,848,001
		2 14 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	%	4,957,987,991		4,957,987,991	100.00	5,292,027,081	5,289,034,631	5,292,027,081	100.00	5,651,736,356	-	5,651,736,356	100.00	28,949,877,920
		2 14 01 02.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kali	4,763,736,991		4,763,736,991	14	5,097,198,581	5,097,198,581	5,097,198,581	14	5,454,002,481	-	5,454,002,481	84	27,816,489,471
		2 14 1 2.02 03	Penyusunan, Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Administrasi perkantoran Administrasi Keuangan yang Tertaksana	Bulan	182,701,000		182,701,000	12	182,701,000	191,836,050	182,701,000	12	185,000,000	-	185,000,000	72	1,075,705,000
		2 14 01 02.02 05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	Dokumen	11,550,000		11,550,000	1 Dokumen	12,127,500		12,127,500	1 Dokumen	12,733,875		12,733,875	5 Dokumen	57,683,449
		2 14 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	11,025,000		11,025,000	80.00	11,576,250		11,576,250	80.00	12,155,063		12,155,063	80.00	55,256,313
		2 14 1 2.05 09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Paket	11,025,000		11,025,000	1 tahun	11,576,250		11,576,250	1 tahun	12,155,063		12,155,063	1 tahun	55,256,313

Tujuan	Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja,tujuan,sasaran,Program, kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Tahun 2024				Tahun 2025				Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir	
									APBD	DAK	TOTAL BELANJA	Target	APBD	DAK	TOTAL BELANJA	Target	APBD	DAK	TOTAL BELANJA	Target	TOTAL APBD	
		2	14	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	%	116.134,030		116.134,030	98,00	118.028,231		118.028,231	98,00	125.017,143	-	125.017,143	98,00	671.491,593	
		2	14	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Paket	6,000,000	6,000,000	1	6,000,000	6,000,000	1	6,000,000	-	6,000,000	6	33.760,000		
		2	14	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Pengekspansikan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Paket	28.334,030	28.334,030	1	29.750,731	29.750,731	1	31.238,268	-	31.238,268	6	166.483,618		
		2	14	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	9.550,000	9.550,000	1	10.027,500	10.027,500	1	10.528,875	-	10.528,875	6	53.248,375		
		2	14	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Persen	10,000,000	10,000,000	100	10,000,000	10,000,000	100	10,000,000	-	10,000,000	100	50,000,000		
		2	14	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	4,000,000	4,000,000	1	4,000,000	4,000,000	1	4,000,000	-	4,000,000	6	23.500,000		
		2	14	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	3,250,000	3,250,000	1	3,250,000	3,250,000	1	3,250,000	-	3,250,000	6	19.500,000		
		2	14	1	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	10,000,000	10,000,000	100,00	10,000,000	10,000,000	100,00	10,000,000	-	10,000,000	100,00	60,000,000		
		2	14	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	45,000,000	45,000,000	100,00	45,000,000	45,000,000	100,00	50,000,000	-	50,000,000	100,00	265,000,000		
		2	14	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	65,000,000	65,000,000	98,00	65,000,000	65,000,000	98,00	65,000,000	-	65,000,000	98,00	321,000,000		
		2	14	1	2.07	05	Pengadaan mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket	35,000,000	35,000,000	1	35,000,000	35,000,000	1	35,000,000	-	35,000,000	5	160,000,000		
		2	14	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor	Paket	30,000,000	30,000,000	1	30,000,000	30,000,000	1	30,000,000	-	30,000,000	6	161,000,000		
		2	14	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	%	785,000,000	785,000,000	100,00	833,000,000	824,250,000	833,000,000	100,00	881,000,000	-	881,000,000	100,00	4,734,000,000	
		2	14	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	155,000,000	155,000,000	12	155,000,000	162,750,000	155,000,000	12	155,000,000	-	155,000,000	72	930,000,000	
		2	14	1	2.08	04	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	630,000,000	630,000,000	12	678,000,000	661,500,000	678,000,000	12	726,000,000	-	726,000,000	72	3,804,000,000	
		2	14	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	%	245,053,305	245,053,305	98,00	260,227,395	231,055,970	260,227,395	98,00	267,637,316	-	267,637,316	98,00	1,394,767,595	
		2	14	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Paket	163,978,305	163,978,305	1 tahun	172,498,645	172,177,220	172,498,645	1 tahun	172,498,645	-	172,498,645	1 tahun	942,638,924	
		2	14	1	2.09	02	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Paket	33,075,000	33,075,000	1 tahun	34,728,750	34,728,750	34,728,750	1 tahun	36,138,671	-	36,138,671	1 tahun	161,000,000	
		2	14	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Paket	23,000,000	23,000,000	1 tahun	23,000,000	24,150,000	23,000,000	1 tahun	24,000,000	-	24,000,000	1 tahun	131,686,250	
		2	14	1	2.09	06	Pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Terpelihara		25,000,000	25,000,000	1 tahun	30,000,000		30,000,000	1 tahun	35,000,000		35,000,000	1 tahun	125,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja,tujuan,sasaran,Program, kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Tahun 2024				Tahun 2025				Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir	
						APBD	DAK	TOTAL BELANJA	Target	APBD	DAK	TOTAL BELANJA	Target	APBD	DAK	TOTAL BELANJA	Target	TOTAL APBD	
		2.14.2.2.02.07	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB	Paket	55,125,000		55,125,000	1 Kegiatan	57,881,250		57,881,250	1 Kegiatan	60,775,313		60,775,313	1 Kegiatan	276,281,563	
		2.14.2.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga	Paket	220,500,000		220,500,000	1 Kegiatan	231,525,000		231,525,000	1 Kegiatan	243,101,250		243,101,250	1 Kegiatan	1,105,126,250	
		2.14.3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Total Fertility Rate (TFR) Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun Persentase kebutuhan ber KB tidak terpenuhi (unmet need) Angka prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Cotraceptive (mCPR) Persentase Tingkat keberfungsian pemakaian kontrasepsi	%	16,657,147,159	6,540,474,748	23,197,621,907	2.21 0.25 8.70 40.75 67.20	17,490,004,517	6,867,498,485	24,357,503,002	2.21 0.25 8.70 40.75 67.20	18,364,504,743	7,210,873,410	25,575,378,153	2.15 0.25 8.70 40.75 67.20	97,573,199,594	
		2.14.3.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	%				4 Kegiatan				4 Kegiatan				4 Kegiatan		
		2.14.3.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kebutuhan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Paket	209,857,843		209,857,843	1 kegiatan	220,350,735		220,350,735	1 kegiatan	231,368,272		231,368,272	1 kegiatan	1,137,833,713	
		2.14.3.2.01.07	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Paket														
		2.14.3.2.01.09	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Pengendalian Program KKBPK	Paket	115,762,500		115,762,500	1 kegiatan	121,550,625		121,550,625	1 kegiatan	127,628,156		127,628,156	1 kegiatan	680,191,281	
		2.14.3.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kebutuhan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	%				6 Kegiatan				6 Kegiatan				6 Kegiatan		
		2.14.3.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Paket	69,816,198	1,466,140,166	1,466,140,166	Pengadaan kendaraan roda Empat, IUD KIT, Pembangunan UPT, DLL	73,307,008	1,539,447,174	1,539,447,174	Pengadaan kendaraan roda Empat, IUD KIT, Pembangunan UPT, DLL	76,972,359	1,616,419,533	1,616,419,533			
		2.14.3.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase Meningkatnya Peran/ Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP	Paket	15,033,829,191		15,033,829,191		15,785,520,650		15,785,520,650		16,574,796,683		16,574,796,683		88,467,705,336	
		2.14.3.02.03	Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	%				4 Kegiatan				4 Kegiatan				4 Kegiatan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja,tujuan,sasaran,Program, kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Tahun 2024						Tahun 2025						Kondisi Kinerja pada Akhir												
						APBD			DAK			TOTAL BELANJA			Target			APBD			DAK			TOTAL BELANJA			Target		TOTAL APBD	
		2 14 3 2.03 05	Penyusunan rencana kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepasi (ALKON) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah distribusi Alkon dan sarana penunjang pelayanan KB ke Fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejingnya di Kota Bandar Lampung	Paket	52,093,125			52,093,125			54,697,781			54,697,781			57,432,670			57,432,670			306,086,077						
		2 14 3 2.03 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase Sarana penunjang pelayanan KB	Paket	413,437,500			413,437,500			434,109,375			434,109,375			455,814,844			455,814,844			2,555,636,719						
		2 14 3 2.03 08	Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejingnya	Jumlah Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Paket	43,879,500			43,879,500	102 Faskes		46,073,475			46,073,475	102 Faskes		48,377,149			48,377,149	102 Faskes		219,920,124						
		2 14 3 2.03 09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Reproduksi Di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Reproduksi Di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Paket		241,634,980	5,074,334,583	5,074,334,583	20 UPT di Kecamatan		253,716,729	5,328,051,312		5,328,051,312	20 UPT di Kecamatan		266,402,566	5,594,453,877		5,594,453,877	20 UPT di Kecamatan								
		2 14 3 2.03 11	Dukungan operasional pelayanan KB Bergerak	Jumlah pelayanan KB pada mobil unit pelayanan (MUYAN)	Paket	463,050,000			463,050,000	20 Kecamatan		486,202,500			486,202,500	20 Kecamatan		510,512,625			510,512,625	20 Kecamatan		2,320,765,125						
		2 14 3 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	Jumlah Kebutuhan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	%					2 Kegiatan						2 Kegiatan						2 Kegiatan								
		2 14 3 2.04 01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	Persentase Cakupan kesetaraan Ber-KB di Kota Bandar Lampung	Paket	132,300,000			132,300,000	1 kegiatan		138,915,000			138,915,000	1 kegiatan		145,860,750			145,860,750	1 kegiatan		948,075,750						
		2 14 3 2.04 02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Pembinaan Lintas Sektor di Kampung KB	Paket	192,937,500			192,937,500	1 kegiatan		202,584,375			202,584,375	1 kegiatan		212,713,594			212,713,594	1 kegiatan		1,236,985,469						
		2 14 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB yang ber-KB) yang ber KB	%	10,099,066,152		547,555,467	10,646,621,619	95		10,604,019,459		574,933,241	11,178,952,700	95		11,134,220,432		603,679,903	11,737,900,335	95		59,339,568,040						
		2 14 4 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%					3 Kegiatan						3 Kegiatan							3 Kegiatan							
		2 14 4 2.01 01	Pembinaan Kelompok Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Peningkatan	Persentase Kualitas Anggota Bina Keluarga Balita, Anak dan Lansia persentase pendapatan Keluarga Sejahtera Peningkatan Pemahaman tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Paket	9,618,376,152			9,618,376,152	1825 Kader Bina Keluarga		10,099,294,960		10,099,294,960	1825 Kader Bina Keluarga		10,604,259,708				10,604,259,708	1825 Kader Bina Keluarga		56,610,392,817						
		2 14 4 02.01 02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/LPPKS)	Jumlah Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/LPPKS)	Paket		547,555,467		547,555,467	1 kegiatan			574,933,241		574,933,241	1 kegiatan		603,679,902		603,679,902	1 kegiatan									

Tujuan	Sasaran	Kode			Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja,tujuan,sasaran,Program, kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Tahun 2024				Tahun 2025				Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir					
								APBD		DAK	TOTAL BELANJA	Target	APBD		DAK	TOTAL BELANJA	Target	APBD		DAK	TOTAL BELANJA	Target	TOTAL APBD		
		2	14	04	02.01	03	Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BK, BKRBK, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Pengetahuan pengelola Poktan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BK, BKR, BKL, UPPKS, PK-R)	Paket	49.612,500			49.612,500	1 kegiatan	52.093,125			52.093,125	1 kegiatan	54.697,781			54.697,781	1 kegiatan	248.653,406
		2	14	4	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%				3 Kegiatan										3 Kegiatan		
		2	14	4	2.02	02	Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BK, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Poktan yang dibina program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BK, BKR, BKL, UPPKS, PK-R)	Paket	60.637,500			60.637,500	1 kegiatan	63.669,375			63.669,375	1 kegiatan	66.852,844			66.852,844	1 kegiatan	303.909,719
		2	14	4	2.02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BK, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Poktan yang dibina program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BK, BKR, BKL, UPPKS, PK-R)	Paket	370.440,000			370.440,000	1 kegiatan	388.962,000			388.962,000	1 kegiatan	408.410,100			408.410,100	1 kegiatan	2.176.612,100

RENCANA P
DINAS P

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program, kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						TOTAL DAK	TOTAL BELANJA		
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia				Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya laju Pertumbuhan Penduduk	%				
Meningkatnya Penyeleenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Keluarga Berencana				Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung	Nilai				
		2 14 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%		36,309,241,821		
		2 14 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Bertualitas	%		182,848,001		
		2 14 1 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dok		182,848,001		
		2 14 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	%		28,949,877,920		
		2 14 01 02.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kali		27,816,489,471		
		2 14 1 2.02 03	Penatausahaan dan Pengujian/Vertikasi Keuangan SKPD	Jasa Administrasi perkantoran Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Bulan		1,075,705,000		
		2 14 01 02.02 05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	Dokumen		57,683,449		
		2 14 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%		55,256,313		
		2 14 1 2.05 09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Paket		55,256,313		

Tujuan	Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja,tujuan,sasaran,Program, kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
									TOTAL DAK	TOTAL BELANJA		
		2	14	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	%		671,491,993		
		2	14	1	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Paket		33,760,000		
		2	14	1	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Paket		166,483,618		
		2	14	1	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket		53,248,375		
		2	14	1	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Persen		50,000,000		
		2	14	1	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket		23,500,000		
		2	14	1	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket		19,500,000		
		2	14	1	2.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen		60,000,000		
		2	14	1	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen		265,000,000		
		2	14	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%		321,000,000		
		2	14	1	2.07	05 Pengadaan mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket		160,000,000		
		2	14	1	2.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor	Paket		161,000,000		
		2	14	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	%		4,734,000,000		
		2	14	1	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan		930,000,000		
		2	14	1	2.08	04 Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan		3,804,000,000		
		2	14	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	%		1,394,767,695		
		2	14	1	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Paket		942,638,924		
		2	14	1	2.09	02 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Paket		161,000,000		
		2	14	1	2.09	06 Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Paket		131,686,250		
		2	14	1	2.09	06 Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Terpelihara			125,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja,tujuan,sasaran,Program, kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
						TOTAL DAK	TOTAL BELANJA			
Meningkatnya derajat kesehatan dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk										
				Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%					
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desakelurahan setiap tahun	%		4.040.336.210		
				2 14 2						
				2 14 2 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebutuhan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	%			
				2 14 2 2.01 02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	Paket		303.909.718	
				2 14 2 2.01 09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Paket		276.281.563	
				2 14 2 2.01 11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Pertemuan Kependudukan	Paket		164.000.000	
				2 14 2 2.01 15	Pelaksanaan Rapat pengendalian Program KK/BPK	Jumlah Rapat pengendalian Program KK/BPK	Paket		138.140.781	
				2 14 2 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	%			
				2 14 2 2.02 01	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Perumusan Parameter Kependudukan	Paket		186.213.773	
				2 14 2 2.02 02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah pengolahan data kependudukan setiap bulan	Paket		237.470.000	
				2 14 2 2.02 03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana	Paket		276.281.563	
				2 14 2 2.02 04	Pemetaan Kependudukan	Jumlah Peta Demografi Kependudukan	Paket		210.970.781	
			2 14 2 2.02 05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Analisa Program KB Bulanan	Paket		313.097.094		
			2 14 2 2.02 06	Pengembangan Model Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Paket		552.563.125		

Tujuan	Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja,tujuan,sasaran,Program, kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
									TOTAL DAK	TOTAL BELANJA		
		2	14	2	2.02	07	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB	Paket		276.281,563	
		2	14	2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga	Paket		1.105.126,250	
		2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Total Fertility Rate (TFR)		38.430,181,613	136.303,381,207	
							Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%				
							Persentase kebutuhan ber KB tidak terpenuhi (unmet need)	%				
							Angka prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Cotraceptive (mCPR)	%				
							Persentase Tingkat keberangsan pemakaian kontrasepsi	%				
		2	14	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	%			
		2	14	3	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kebutuhan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Paket		1.137.833,713	
		2	14	3	2.01	07	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Paket			
		2	14	3	2.01	09	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Pengendalian Program KKBPK	Paket		680,191,281	
		2	14	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kebutuhan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	%			
		2	14	3	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Paket			
		2	14	3	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase Meningkatnya Peran/ Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP	Paket		88,467,705,336	
		2	14	3	02.03		Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	%			

Tujuan	Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja,tujuan,sasaran,Program, kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
									TOTAL DAK	TOTAL BELANJA		
		2	14	3	2.03	05	Penyusunan rencana kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepasi (ALKON) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah distribusi Alkon dan sarana penunjang pelayanan KB ke Fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejingnya di Kota Bandar Lampung	Paket		306.086,077	
		2	14	3	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase Sarana penunjang pelayanan KB	Paket		2.555.636,719	
		2	14	3	2.03	08	Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejingnya	Jumlah Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Paket		219.920,124	
		2	14	3	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Reproduksi Di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Reproduksi Di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Paket	25.432,110,424	25.432,110,424	
		2	14	3	2.03	11	Dukungan operasional pelayanan KB Bergerak	Jumlah pelayanan KB pada mobil unit pelayanan (MUYAN)	Paket		2.320.765,125	
		2	14	3	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetiaan Ber-KB	Jumlah Kebutuhan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetiaan Ber-KB	%			
		2	14	3	2.04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetiaan Ber-KB	Persentase Cakupan kesetiaan Ber-KB di Kota Bandar Lampung	Paket		948.075,750	
		2	14	3	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Pembinaan Lintas Sektor di Kampung KB	Paket		1.236.985,469	
		2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB yang ber-KB) yang ber KB	%	3.217.297,958	62.556.865,998	
		2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%			
		2	14	4	2.01	01	Pembinaan Kelompok Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Pembinaan)	Persentase Kualitas Anggota Bina Keluarga Balita, Anak dan Lansia persentase pendapatan Keluarga Sejahtera Peningkatan Pemahaman tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Paket		56.610.392,817	
		2	14	4	02.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/LPPKS)	Jumlah Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/LPPKS)	Paket	3.217.297,958	3.217.297,958	

Tujuan	Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja,tujuan,sasaran,Program, kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
									TOTAL DAK	TOTAL BELANJA			
		2	14	04	02.01	03	Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BK, BKRBKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Pengetahuan pengelola Poktan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BK, BKR, BKL, UPPKS, PK-R)	Paket		248.653,406		
		2	14	4		2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%				
		2	14	4		2.02	Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BK, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Poktan yang dibina program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BK, BKR, BKL, UPPKS, PK-R)	Paket		303.909,719		
		2	14	4		2.02	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BK, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Poktan yang dibina program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BK, BKR, BKL, UPPKS, PK-R)	Paket		2.176.612,100		

TABEL TC.28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77
	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan Setiap Tahun	100	100	100	100	100	100	100	100
	Total Fertility Rate (TFR)	2.37	2,35	2,30	2,25	2,20	2.15	2,10	2,10
	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang isterinya dibawah 20 tahun	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,24
	Persentase kebutuhan ber KB tidak terpenuhi (unmeet need)	11,50	8,93	8,85	8,80	8,75	8,70	8,65	8,65
	Angka prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Cotraceptive (mCPR)	34,68	36,78	37,55	38,65	39,70	40,75	41,85	41,85
	Persentase Tingkat keberlangsungan pemakaian kotrasepsi	72,79	66,17	66,80	66,95	67,15	67,20	67,36	67,36
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber KB	87	89	90	92	94	95	98	98

Bandar Lampung, Oktober 2021
**KEPALA DINAS PEGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA KOTA BANDAR LAMPUNG**



Ir. YURIDA, M.Si.
NIP. 19620526 198603 2 005

FORMULIR E.80
EVALUASI TERHADAP HASIL RENSTRA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG
RENSTRA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2016-2020

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG YANG MENGACU PADA SASARAN RPJMD KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun	Target Capaian pada Tahun Akhir Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Terpeenuhnya Operasional Perkantoran	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR OPD	100%	100%	3,271,989,888	100%	534,462,200	100%	618,427,329	100%	618,427,329	100%	618,427,324	100%	1,015,553,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Terpeenuhnya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun	1 tahun	294,353,718	1 tahun	133,000,000	1 tahun	161,956,329	1 tahun	161,956,329	1 tahun	161,956,324	1 tahun	175,000,000		
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terpeenuhnya Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	1 tahun	1 tahun	341,725,218	1 tahun	109,523,000	1 tahun	199,523,000	1 tahun	199,523,000	1 tahun	199,523,000	1 tahun	521,250,000		
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpeenuhnya Jasa Administrasi Keuangan	1 tahun	1 tahun	341,725,218	1 tahun	141,321,000	1 tahun	139,546,000	1 tahun	139,546,000	1 tahun	139,546,000	1 tahun	193,651,000		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpeenuhnya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 tahun	1 tahun	15,312,000	1 tahun	4,880,000	1 tahun	4,880,000	1 tahun	4,880,000	1 tahun	4,880,000	1 tahun	4,880,000		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpeenuhnya Alat Tulis Kantor	1 tahun	1 tahun	87,753,500	1 tahun	32,120,000	1 tahun	24,476,000	1 tahun	24,476,000	1 tahun	24,476,000	1 tahun	24,476,000		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpeenuhnya Peralatan Rumah Tangga	1 tahun	1 tahun	25,738,000	1 tahun	7,296,000	1 tahun	7,296,000	1 tahun	7,296,000	1 tahun	7,296,000	1 tahun	7,296,000		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpeenuhnya Barang Cetak dan Penggandaan	1 tahun	1 tahun	17,422,000	1 tahun	9,322,200	1 tahun	3,000,000	1 tahun	3,000,000	1 tahun	3,000,000	1 tahun	3,000,000		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpeenuhnya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 tahun	1 tahun	14,388,000	1 tahun	3,000,000	1 tahun	3,000,000	1 tahun	3,000,000	1 tahun	3,000,000	1 tahun	3,000,000		
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpeenuhnya Penyediaan Makanan dan Minuman	1 tahun	1 tahun	29,700,000	1 tahun	9,000,000	1 tahun	9,000,000	1 tahun	9,000,000	1 tahun	9,000,000	1 tahun	9,000,000		
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terpeenuhnya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1 tahun	1 tahun	146,698,620	1 tahun	55,000,000	1 tahun	41,750,000	1 tahun	41,750,000	1 tahun	41,750,000	1 tahun	50,000,000		
	Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Perizinan Kendaraan Dinas dan Operasional	1 tahun	1 tahun	4,967,750	1 tahun	30,000,000	1 tahun	24,000,000	1 tahun	24,000,000	1 tahun	24,000,000	1 tahun	24,000,000		
2	Peralatan Kerja dan Perlengkapan Perkantoran yang Optimal dalam jumlah	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PEMENUHAN KEBUTUHAN INVENTARIS KANTOR YANG TERPELIHARA	100%	100%	437,047,350	1 tahun	335,814,176	1 tahun	287,132,088	1 tahun	260,046,264	1 tahun	216,964,176	1 tahun	295,550,000	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeenuhnya Perlengkapan Gedung Kantor	1 paket	1 paket	341,725,218	1 paket	89,000,000	1 paket	90,000,000	1 paket	41,000,000	1 paket	41,000,000	1 paket	112,700,000		
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpeenuhnya Peralatan Gedung Kantor			0	1 paket	22,450,000	1 paket	22,000,000								
	Pengadaan Mebeleur	Terpeenuhnya Pengadaan Mebeleur	1 paket	1 paket	37,250,000	1 paket	42,500,000	1 paket	37,250,000	1 paket	37,250,000	1 paket	37,250,000	1 paket	0		
	Pengadaan Komputer PC/Notebook dan Kelengkapannya	Terpeenuhnya Pengadaan Komputer PC/Notebook dan Kelengkapannya	1 paket	1 paket	77,555,000	1 paket	63,250,000	1 paket	63,250,000	1 paket	64,082,088	1 paket	21,000,000	1 paket	44,000,000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeenuhnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	1 paket	1 paket	106,876,200	1 paket	33,532,088	1 paket	33,532,088	1 paket	33,532,088	1 paket	33,532,088	1 paket	28,550,000		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																			
					Target Capaian pada Tahun Akhir Tahun Perencanaan (2020)					Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					(7)			(8)			(9)			(10)			(11)		
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeenuhnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 paket	1 paket		191,316,150	1 paket		64,082,088	1 paket		21,000,000	1 paket		64,082,088	1 paket		64,082,088	1 paket		90,200,000		
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeenuhnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1 paket	1 paket		14,850,000	1 paket		21,000,000	1 paket		20,100,000	1 paket		20,100,000	1 paket		20,100,000	1 paket		20,100,000		
3	Meningkatnya Pelatihan dan Pendidikan Pegawai	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PENINGKATAN KUANTITAS SDM DALAM PEMENUHAN KOMPETENSI JABATAN	100%	100%			100%		15,000,000	100%		25,729,000	100%		25,729,000	100%		25,729,000	100%		0		
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Kemampuan PNS	1 tahun	1 tahun		17,623,600	1 tahun		15,000,000	1 tahun		25,729,000	1 tahun		25,729,000	1 tahun		25,729,000	1 tahun		0		
4		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN OPD TEPAT WAKTU	100%	100%					25,000,000			25,000,000			25,000,000			25,000,000			25,000,000		
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan	1 tahun	1 tahun		0			25,000,000			25,000,000			25,000,000			25,000,000			25,000,000		
5	Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 th	2.78	2.83			2.79	%		2.80	%		2.81	%		2.82	%		2.83	%			
			Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)	12.23	9.31	18,304,224,950		12.93	%	841,419,450	12.92	%	2,102,084,000	10.93	%	4,474,304,000	10.13	%	5,646,583,000	9.31	%	5,239,834,500		
			Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif	67.30	67.40			67.32	%		67.34	%		67.36	%		67.38	%		67.40	%			
		Pembinaan dan Operasional Keluarga Berencana melalui Kegiatan Momentum	Terlaksananya Pembinaan dan Operasional KB Momentum	1 tahun	1 tahun		357,896,500	1 tahun		73,476,550	1 tahun		120,000,000	1 tahun		120,000,000	1 tahun		120,000,000	1 tahun		53,125,000		
		Penyediaan Pelayanan KB dan Penyediaan Alat Kontrasepsi	Tersedianya Alat Kontrasepsi	105.000 Akseptor	105.000 Akseptor		1,109,662,450	105.000 Akseptor		221,216,100	105.000 Akseptor		363,500,000	105.000 Akseptor		363,500,000	105.000 Akseptor		363,500,000	105.000 Akseptor		286,952,500		
		Pengendalian dan Distribusi Alat Kontrasepsi	Terfasilitasinya Distribusi Alat Kontrasepsi	102 Faskes	102 Faskes		73,727,650	0		0	102 Faskes		43,200,000	102 Faskes		43,200,000	102 Faskes		43,200,000	102 Faskes		26,659,000		
		Fasilitas program Keluarga Berencana di Wilayah Kumuh, Miskin dan Pesisir Pantai	Terfasilitasinya Pelayanan di Wilayah Kumuh, Miskin dan Pesisir	1 Kegiatan	1 Kegiatan		189,063,850	1 Kegiatan		0	1 Kegiatan		121,234,000	1 Kegiatan		121,234,000	1 Kegiatan		121,234,000	1 Kegiatan		51,995,000		
		Pengadaan sarana dan Prasarana KB Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik Bidang KB)	Tersedianya Internet UPT, Distribusi Alkon, pertemuan tingkat RT, kelurahan, kecamatan, kota Bandar Lampung	7 UPT di Kecamatan	11 UPT di Kecamatan		3,720,810,117	7 UPT di Kecamatan		191,785,500	7 UPT di Kecamatan		540,150,000	8 UPT di Kecamatan		3,078,370,000	12 UPT di Kecamatan		3,503,719,000	15 UPT di Kecamatan		3,554,596,000		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																													
					Target Capaian pada Tahun Perencanaan (2020)					Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020												
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					(7)					(8)					(9)					(10)					(11)				
		Peringatan Hari Keluarga Nasional Tk Nasional/Provinsi,Kota	Terselenggaranya Hari Keluarga Nasional, Tingkat Provinsi dan Kota	3 kegiatan	3 kegiatan		365,447,253	3 kegiatan		0	3 kegiatan		100,000,000	3 kegiatan		100,000,000	3 kegiatan		100,000,000	3 kegiatan		0												
		Pembentukan dan Pengembangan Kampung KB	Terselenggaranya Kampung KB	1 kegiatan	1 kegiatan		136,463,500	1 kampung kb		0	1 kampung kb		107,500,000	1 kampung kb		131,990,400	1 kampung kb		107,500,000	1 kampung kb		0												
		Penyebarluasan KIE Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Terselenggaranya KIE	1 kegiatan	1 kegiatan			1 kegiatan		0	1 kegiatan		92,000,000	1 kegiatan		92,000,000	1 kegiatan		92,000,000	1 kegiatan		22,627,000												
		Penyuluhan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Terselenggaranya Penyuluhan Program KB	-	-		31,200,000	-		0	1 kegiatan		58,000,000	1 kegiatan		58,000,000	1 kegiatan		58,000,000	1 kegiatan		0												
7	Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	PROGRAM KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha	82.60	87	%		80.40			87	%		87	%		87	%		87	%													
			Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB																															
			Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi utk Memenuhi Permintaan Masyarakat setiap tahun	30.00	30	%	14,277,253,000	30.00		500,000,000	30	%	2,979,241,000	30	%	3,000,991,000	30	%	3,526,741,000	30	%	4,270,280,000												
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	78.70	70	%								70	%		70	%		70	%														
		Pembentukan dan Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Balita, Anak, dan Lansia	Meningkatnya Kualitas Anggota Bina Keluarga Balita, Anak dan Lansia	1825 Kader Bina Keluarga	1825 Kader Bina Keluarga		6,962,387,350	-		0	1825 Kader Bina Keluarga		1,702,921,000	1825 Kader Bina Keluarga		1,702,921,000	1825 Kader Bina Keluarga		2,250,421,000	1825 Kader Bina Keluarga		3,133,662,500												
		Pembentukan dan Pengembangan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	Meningkatnya Pendapatan Keluarga Sejahtera	-	-		124,205,909	-		0	4		79,570,000	4		101,320,000	4		79,570,000	4		14,520,000												
		Pembentukan dan Pengembangan Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK)	Peningkatan Pemahaman tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	-	-		618,469,000	-		500,000,000	2		69,250,000	4		69,250,000	4		69,250,000	4		59,597,500												
		Temu Mahasiswa Peduli Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Meningkatnya Pemahaman Tentang KB	1 kegiatan	1 kegiatan		61,415,000	-		0	1 kegiatan		88,500,000	1 kegiatan		88,500,000	1 kegiatan		88,500,000	1 kegiatan		23,500,000												
		Lomba Kesatuan Gerak KB	Terlaksananya Lomba Kesatuan Gerak	1 kegiatan	1 kegiatan		838,257,000	1 kegiatan		0	1 kegiatan		320,000,000	1 kegiatan		320,000,000	1 kegiatan		320,000,000	1 kegiatan		320,000,000												
		Pertemuan Kependudukan dan KB Tingkat Kota Bandar Lampung	Terlaksananya Pertemuan Kependudukan	1 kegiatan	1 kegiatan		460,655,000	1 kegiatan		0	1 kegiatan		164,000,000	1 kegiatan		164,000,000	1 kegiatan		164,000,000	1 kegiatan		164,000,000												
		Integrasi Program Kependudukan dan KB Tingkat Lini Lapangan	Terlaksananya Program Kependudukan dan KB di tingkat Lini Lapangan	1 kegiatan	1 kegiatan		758,737,500	1 kegiatan		0	1 kegiatan		270,000,000	1 kegiatan		270,000,000	1 kegiatan		270,000,000	1 kegiatan		270,000,000												
		Peningkatan Kejasama dengan mitra dalam rangka pembangunan Kependudukan Kota Bandar Lampung	Meningkatnya Kejasama dengan mitra dalam rangka pembangunan Kependudukan	1 kegiatan	1 kegiatan		581,645,550	1 kegiatan		0	1 kegiatan		285,000,000	1 kegiatan		285,000,000	1 kegiatan		285,000,000	1 kegiatan		285,000,000												
8	Meningkatkan Pengendalian Jumlah Penduduk	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan setiap Tahun	100	100	%	1,055,000,000	100		0	100	%	315,000,000	100	%	315,000,000	100	%	315,000,000	100	%	110,000,000												
			Pendataan Keluarga	Tersedianya Data Mikro Keluarga	1 kegiatan	1 kegiatan		70,476,000	1 kegiatan		0	1 kegiatan		#####	1 kegiatan		#####	1 kegiatan		110,000,000	1 kegiatan		110,000,000											
			Penyediaan Peta Demografi Kependudukan	Tersedianya Peta Demografi Kependudukan	1 kegiatan	1 kegiatan		19,500,000	1 kegiatan		0	1 kegiatan		55,000,000	1 kegiatan		55,000,000	1 kegiatan		55,000,000	0		0											

Realisasi Capaian Tahun Ke-												Rasio Capaian Tahun Ke-														
Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.
(13)			(14)			(15)			(16)			(17)			(19)			(20)			(21)			(22)		
100%		473,891,349	100%		382,552,772	100%		746,330,869	100%		791,020,198	100%		878,194,700	100		89	100		62	100		121	100		
1 tahun		58,161,149	1 tahun		63,624,390	1 tahun		83,425,869	1 tahun		89,142,310	1 tahun		47,371,500	100		44	100		39	100		52	100		
1 tahun		104,223,000	1 tahun		172,473,000	1 tahun		199,273,000	1 tahun		334,000,000	1 tahun		430,000,000	100		95	100		86	100		100	100		
1 tahun		106,691,000	1 tahun		101,875,000	1 tahun		101,967,000	1 tahun		98,450,000	1 tahun		182,502,000	100		75	100		73	100		73	100		
1 tahun		3,470,000	1 tahun		984,000	1 tahun		4,366,000	1 tahun		4,056,000	1 tahun		2,436,000	100		71	100		20	100		89	100		
1 tahun		23,376,000	1 tahun		10,195,000	1 tahun		20,488,500	1 tahun		22,289,000	1 tahun		11,405,000	100		73	100		42	100		84	100		
1 tahun		6,366,000	1 tahun		5,464,000	1 tahun		7,278,000	1 tahun		3,202,000	1 tahun		3,428,000	100		87	100		75	100		100	100		
1 tahun		8,164,000	1 tahun		2,239,000	1 tahun		2,501,500	1 tahun		2,160,000	1 tahun		2,357,500	100		88	100		75	100		83	100		
1 tahun		2,934,000	1 tahun		2,860,000	1 tahun		2,910,000	1 tahun		2,854,000	1 tahun		2,830,000	100		98	100		95	100		97	100		
1 tahun		6,750,000	1 tahun		5,110,000	1 tahun		7,340,000	1 tahun		6,750,000	1 tahun		3,750,000	100		75	100		57	100		82	100		
1 tahun		36,509,200	1 tahun		16,387,632	1 tahun		29,263,000	1 tahun		36,854,788	1 tahun		27,684,000	100		66	100		39	100		70	100		
1 tahun		998,000	1 tahun		1,340,750	1 tahun		1,041,000	1 tahun		794,000	1 tahun		794,000	100		3	100		6	100		4	100		
1 tahun		58,124,500	1 tahun		58,631,950	1 tahun		143,238,500	1 tahun		95,234,050	1 tahun		81,818,350	100		17	100		20	100		55	100		
1 paket		0	1 paket		0	1 paket		9,200,000	1 paket		0	1 paket		0	0		0	0		0	100		22	0		
1 paket		0	1 paket		0	1 paket		0	1 paket		0	1 paket		0	0		0	0		0	0		0	0		
1 paket		0	1 paket		0	1 paket		37,250,000	1 paket		0	1 paket		0	0		0	0		0	100		100	0		
1 paket		0	1 paket		0	1 paket		56,555,000	1 paket		21,000,000	1 paket		0	0		0	0		0	100		88	100		
1 paket		27,279,000	1 paket		18,298,950	1 paket		22,771,000	1 paket		21,324,250	1 paket		17,203,000	100		81	100		55	100		68	100		

Realisasi Capaian Tahun Ke-												Rasio Capaian Tahun Ke-														
Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.
(13)			(14)			(15)			(16)			(17)			(19)			(20)			(21)			(22)		
1 paket		23,095,500	1 paket		37,033,000	1 paket		17,462,500	1 paket		52,909,800	1 paket		60,815,350	100		36	100		176	100		27	100		
1 paket		7,750,000	1 paket		3,300,000	1 paket		0	1 paket		0	1 paket		3,800,000	100		37	100		16	0		0	0		0
100%		2,000,000	100%		0	100%		0	100%		15,623,600	100%		0	100		13	0		0	0		0	100		
1 tahun		2,000,000	1 tahun		0	1 tahun		0	1 tahun		15,623,600	1 tahun		0	100		13	0		0	0		0	100		
1 tahun		9,775,000	1 tahun		8,080,000	1 tahun		2,675,000	1 tahun		10,450,000	1 tahun		16,250,000	100		39	100		32	10		11	100		
1 tahun		9,775,000	1 tahun		8,080,000	1 tahun		2,675,000	1 tahun		10,450,000	1 tahun		16,250,000	100		39	100		32	10		11	100		
2.79	%	841,419,450	2.75	%	777,073,600	2.95	%	2,069,028,650	0.28	%	2,856,509,050	0.3	%	894,011,117	100	%	100.0	101.82	%	36.97	95.25	%	46.24	1007.14	%	87.18
12.93	%		12.25	%		11.62	%		11.50	%		105.47	%		89.22	%		87.18	%							
67.32	%		62.43	%		72.43	%		72.65	%		72.79	%		107.86	%		93.00	%		92.75	%				
1 tahun		73,476,550	1 tahun		69,339,750	1 tahun		78,726,000	1 tahun		87,663,200	1 tahun		48,691,000	100		100	100		58	100		66	100		
105.000 Akseptor		221,216,100	105.000 Akseptor		265,067,250	105.000 Akseptor		311,930,650	105.000 Akseptor		309,948,450	105.000 Akseptor		1,500,000	100		100	100		73	100		86	100		
0		0	102 Faskes		17,271,600	102 Faskes		15,463,000	102 Faskes		31,406,550	102 Faskes		9,586,500	100		0	100		40	100		36	100		
1 Kegiatan		0	1 Kegiatan		35,173,500	1 Kegiatan		78,726,000	1 Kegiatan		69,769,350	1 Kegiatan		5,395,000	0		0	100		29	100		65	100		
7 UPT di Kecamatan		191,785,500	7 UPT di Kecamatan		39,121,500	8 UPT di Kecamatan		1,030,067,000	10 UPT di Kecamatan		1,636,392,500	11 UPT di Kecamatan		823,443,617	100		100	100		7	100		33	83		

Realisasi Capaian Tahun Ke-													Rasio Capaian Tahun Ke-												
Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 20				
Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.		
(13)			(14)			(15)			(16)			(17)			(19)		(20)		(21)		(22)				
Genre KIT, IUD KIT, BKB KIT, Alat Kerja PLKB, Pembangunan UPT, DLL		283,400,000	Genre KIT, IUD KIT, BKB KIT, Alat Kerja PLKB, Pembangunan UPT, DLL		351,100,000	Genre KIT, IUD KIT, BKB KIT, Alat Kerja PLKB, Pembangunan UPT, DLL		554,116,000	Genre KIT, IUD KIT, BKB KIT, Alat Kerja PLKB, Pembangunan UPT, DLL		721,329,000	Genre KIT, IUD KIT, BKB KIT, Alat Kerja PLKB, Pembangunan UPT, DLL		0	100		100	100		38	100		74	100	
1 Kegiatan		0												0	0										
1 Kegiatan		26,539,600	0		0	0		0	0		0	0		0	100		100	0		0	0		0	0	
1 Kegiatan		38,901,700	0		0	0		0	0		0	0		0	100		100	0		0	0		0	0	
1 Kegiatan		6,100,000	0		0	0		0	0		0	0		0	100		100	0		0	0		0	0	
2.17	Angka		2.17	Angka		2.15	Angka		2.17	Angka		2.37	Angka		100	Angka		100	Angka		100	Angka		98.62	Angka
70.63	%		69.05	%		66.60	%		100.00	%		100.00	%		100	%		100	%		66.60	%		100.00	%
100.00	%	2,808,296,700	100.00	%	2,766,743,300	100.00	%	2,912,772,535	100.00	%	3,659,690,700	100.00	%	2,186,985,000		#DIV/0!		89.93			93.93				
30.50	%		32.48	%		21.12	%		32.19	%		34.68	%		100	%		100	%		63.65	%		93.69	%
10.70	%		10.70	%		18.94	%		16.54	%		15.58	%		100	%		100	%		50.53	%		46.61	%
1 kegiatan		0	1 kegiatan		0	1 kegiatan		0	1 kegiatan		10,800,000	1 kegiatan		2,025,000	0		0	0		0	0		0	100	
126 PPKBD dan 2774 Sub PPKBD		2,620,050,000	126 PPKBD dan 2774 Sub PPKBD		2,613,223,500	126 PPKBD dan 2774 Sub PPKBD		2,637,500,000	126 PPKBD dan 2774 Sub PPKBD		3,486,110,000	126 PPKBD dan 2774 Sub PPKBD		2,180,235,000	100		#DIV/0!	100		98	100		99	100	
1 kegiatan		38,901,700	1 kegiatan		9,000,000	1 kegiatan		24,953,932	1 kegiatan		13,102,600	1 kegiatan		4,725,000	100		#DIV/0!	100		23	100		62	100	

Realisasi Capaian Tahun Ke-												Rasio Capaian Tahun Ke-													
Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2020				
Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.		
(13)			(14)			(15)			(16)			(17)			(19)			(20)			(21)			(22)	
3 kegiatan		118,570,000	3 kegiatan		86,434,050	3 kegiatan		87,731,103	3 kegiatan		72,712,100	3 kegiatan		0	100		#DIV/0!	100		86	100		88	100	
1 kampung KB		0	1 kampung KB		9,552,500	1 kampung KB		107,500,000	1 kampung KB		19,411,000	1 kampung KB		0	0		0	100		9	100		81	100	
1 kegiatan		30,775,000	1 kegiatan		36,033,250	1 kegiatan		36,387,500	1 kegiatan		57,555,000	1 kegiatan		0	100		#DIV/0!	100		39	100		40	100	
1 kegiatan		0	1 kegiatan		12,500,000	1 kegiatan		18,700,000	1 kegiatan		0	1 kegiatan		0	0		0	100		22	100		32	0	
80.40	%		81.67	%		91.67	%		84.21	%		50.00	%		100.00	%		93.87	%		105.37	%		96.79	%
30.00	%	500,000,000	30.00	%	2,458,016,450	30.00	%	2,645,962,300	30.00	%	3,185,521,059	30.00	%	1,705,345,000	100.00	%	82.50	100.00	%	82.50	100.00	%	88.17	100.00	%
	%		67.62	%		97.62	%		96.82	%		50.00	%	0	%		96.00	%		139.46	%		138.31	%	
1825 Kader Bina Keluarga		0	1825 Kader Bina Keluarga		1,666,332,750	1825 Kader Bina Keluarga		1,687,832,000	1825 Kader Bina Keluarga		2,226,460,100	1825 Kader Bina Keluarga		1,381,762,500	100		0	100		98	100		99	100	
4		0	4		13,369,950	4		79,570,000	4		31,265,959	4		0	-		-	100		17	100		79	100	
4		500,000,000	2		33,254,000	4		46,137,500	4		39,077,500	4		4,797,500	0		0	100		48	100		67	100	
1 kegiatan		0	1 kegiatan		11,220,000	1 kegiatan		42,895,000	1 kegiatan		0	1 kegiatan		7,300,000	-		-	100		13	100		48	100	
1 kegiatan		0	1 kegiatan		262,926,000	1 kegiatan		245,566,000	1 kegiatan		310,940,000	1 kegiatan		18,825,000	100		82	100		82	100		77	100	
1 kegiatan		0	1 kegiatan		123,555,000	1 kegiatan		119,060,000	1 kegiatan		97,850,000	1 kegiatan		120,190,000	100		75	100		75	100		73	100	
1 kegiatan		0	1 kegiatan		213,194,000	1 kegiatan		202,641,000	1 kegiatan		258,627,500	1 kegiatan		84,275,000	100		79	100		79	100		75	100	
1 kegiatan		0	1 kegiatan		134,164,750	1 kegiatan		222,260,800	1 kegiatan		221,300,000	1 kegiatan		3,920,000	100		47	100		47	100		78	100	
100	%	0	100	%	131,393,100	100	%	101,576,000	100	%	130,470,000	50	%	0	100	%	0.00	100	%	41.71	100	%	32.25	100	%
1 kegiatan		0	1 kegiatan		31,776,000	1 kegiatan		8,800,000	1 kegiatan		29,900,000	1 kegiatan		0	0		0	100		29	100		8	100	
1 kegiatan		0	1 kegiatan		7,300,000	1 kegiatan		5,650,000	1 kegiatan		6,550,000	1 kegiatan		0	0		0	100		13	100		10	100	

Realisasi Capaian Tahun Ke-												Rasio Capaian Tahun Ke-										
Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(13)			(14)			(15)			(16)			(17)			(19)		(20)		(21)		(22)	
1 kegiatan		0	1 kegiatan		25,605,100	1 kegiatan		15,955,000	1 kegiatan		0	1 kegiatan		0	0	0	100		64	100		40
1 kegiatan		0	1 kegiatan		66,712,000	1 kegiatan		71,171,000	1 kegiatan		94,020,000	1 kegiatan		0	0	0	100		61	100		65
75.00	%	17,465,000													0.00	%	0					
80.00	%	17,465,000																				
78.30	%	1,699,817,750													100	%	100					
1825 Kader Bina Keluarga		1,699,817,750													100		100					
100%		124,772,350													100		100					
1 tahun		6,211,000													100		100					
1 kegiatan		99,601,750													100		100					
1 kegiatan		12,403,600													100		100					
1 tahun		6,556,000													100		100					
100%	%	154,248,500													100	%	100					
1 kegiatan		154,248,500													100		100					

019	Tahun 2020			Rp.	Unit Kerja Penanggung jawab Unit Kerja Penanggungjawab
	Rp.	Target			
		(23)			(25)
128	100		86		DINAS PP DAN KB
55	100		27		
167	100		82		
71	100		94		
83	100		50		
91	100		47		
44	100		47		
72	100		79		
95	100		94		
75	100		42		
88	100		55		
3	100		3		
44	100		28		DINAS PP DAN KB
0	0		0		
0	0		0		
0	0		0		
100	0		0		
64	100		60		

019	Tahun 2020			Unit Kerja Penanggung Jawab Unit Kerja Penanggungjawab
	Rp.	Target	Rp.	
	(23)			
83	100		67	
0	100		19	
61	0		0	DINAS PP DAN KB
61	0		0	
42	100		65	
42	100		65	
50.59	10.00		17.06	DINAS PP DAN KB
	123.52			
	108.00			
73	100		92	
85	100		1	
73	100		36	
58	100		10	
47	73		23	

				Unit Kerja Penanggung Jawab Unit Kerja Penanggungjawab
019	Tahun 2020			(25)
	Rp.	Target	Rp.	
	(23)			
48	100		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
92.73	89.45	Angka	44.09	DINAS PP DAN KB
	100.00	%		
	100.00	%		
	98.02	%		
	41.59	%		
43	100		8	
99	100		45	
33	100		21	

019	Tahun 2020			Unit Kerja Penanggung Jawab Unit Kerja Penanggungja wab
	Rp.	Target	Rp.	
	(23)			
73	0		0	
18	0		0	
63	100		0	
0	0		0	
90.32	57.47	%	39.94	DINAS PP DAN KB
	100.00	%		
	71.43	%		
99	100		44	
39	100		0	
56	100		8	
0	100		31	
97	10		6	
60	100		73	
96	100		31	
78	80		1	
41.42	50	%	0	DINAS PP DAN KB
27	100		0	
12	100		0	

019	Tahun 2020			Unit Kerja Penanggung Jawab Unit Kerja Penanggungja wab
	Rp.	Target	Rp.	
		(23)		(25)
0	100		0	
85	100		0	
				DINAS PP DAN KB
				DINAS PP DAN KB
				DINAS PP DAN KB
				DINAS PP DAN KB

